

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berlandaskan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tersirat bahwa hakikat pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi (Bappenas, 2004). Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Suatu perekonomian dikatakan mengalami suatu perubahan akan perkembangannya apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi daripada yang dicapai pada masa sebelumnya. Menurut Sadono Sukirno (1996: 33), pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang.

Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan. Keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonominya. Oleh sebab itu, setiap daerah selalu menetapkan target tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi didalam perencanaan dan tujuan

pembangunan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang (Boediono, 1985). Kata “perkapita” menunjukkan ada dua sisi yang perlu diperhatikan, yaitu sisi output total-nya (GDP) dan sisi jumlah penduduk. Proses kenaikan output perkapita, tidak bisa tidak, harus dianalisa dengan jalan melihat apa yang terjadi dengan output total disatu pihak, dan jumlah penduduk dipihak lain. Sehingga menjelaskan apa yang terjadi dengan GDP total dan apa yang terjadi pada jumlah penduduk. Oleh karena itu, posisi penduduk dalam pembangunan ekonomi menjadi penting karena pertumbuhan ekonomi sendiri selalu terkait dengan jumlah penduduk.

Pertumbuhan penduduk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat sebagai penghalang bagi pertumbuhan ekonomi. Di negara maju pertumbuhan penduduk mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena didukung oleh investasi yang tinggi, teknologi yang tinggi dan lain-lain. Akan tetapi di negara berkembang, akibat pertumbuhan penduduk terhadap pembangunan tidaklah demikian, karena kondisi yang berlaku sama sekali berbeda dengan kondisi ekonomi negara maju. Ekonomi negara berkembang modal kurang, teknologi masih sederhana, tenaga kerja kurang ahli karena itu, pertumbuhan penduduk benar-benar dianggap sebagai hambatan pembangunan ekonomi, dimana pertumbuhan penduduk yang cepat memperberat tekanan pada lahan dan menyebabkan pengangguran dan akan

mendorong meningkatnya beban ketergantungan. Penyediaan fasilitas pendidikan dan sosial secara memadai semakin sulit terpenuhi (Todaro, 1995).

Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan, umum. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program, dan kegiatan serta jenis belanja. Untuk memudahkan dalam mengelompokkan klasifikasi belanja sesuai dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan klasifikasi belanja menurut fungsi sebagai sumber data. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut PP No. 58/2005, Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja pemerintah bantuan sosial tentunya dapat mendorong pengetasan kemiskinan. Sebagaimana diketahui bahwa belanja bantuan social merupakan belanja pemerintah yang ditujukan kepada Masyarakat tidak mampu guna melindungi Masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/ atau kesejahteraan Masyarakat.

Belanja pendidikan merupakan jenis belanja daerah yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota dalam bidang pendidikan. Belanja kesehatan merupakan jenis belanja daerah yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota dalam bidang kesehatan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 pasal 171 ayat (2) menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji. Menurut Tambunan (2011) Belanja bantuan sosial yang disalurkan secara tepat dan sesuai sasaran serta mengalami peningkatan setiap tahunnya maka diharapkan mampu mengurangi penduduk miskin. Semakin besar belanja bantuan sosial maka akan meningkatkan aktivitas perekonomian daerah tersebut dan tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat sehingga akan mengurangi jumlah penduduk miskin.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh BI Anhar (2018) dengan judul pengaruh belanja pendidikan, belanja kesehatan, belanja infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh 2010-2015. Hasil penelitian ini menunjukkan belanja Pendidikan berpengaruh positive dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan belanja kesehatan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan belanja infrastruktur berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Royda, Frecilia Nanda Melvani (2018) dengan judul pengaruh

belanja pemerintah untuk Pendidikan, Kesehatan, infrastruktur serta pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja Pendidikan mempunyai pengaruh negatif dan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja Kesehatan mempunyai pengaruh negatif dan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ita Riski (2023) dengan judul pengaruh belanja hibah dan belanja bantuan sosial, terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi periode tahun 2001-2019.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial kedua variabel belanja hibah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan belanja bantuan sosial berpengaruh netif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengamati masalah dan mengkaji lebih dalam lagi tentang **“Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan Dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten Malaka”**

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis mencoba merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan Dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Malaka”

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian di atas maka persoalan penelitian ini adalah:

- a. Apakah belanja pendidikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Malaka?
- b. Apakah belanja kesehatan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Malaka?
- c. Apakah belanja bantuan sosial berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Malaka?

1.4 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan persoalan penelitian dan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh belanja pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Malaka
2. Untuk mengetahui pengaruh belanja kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Malaka
3. Untuk mengetahui pengaruh dana belanja bantuan sosial terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Malaka.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi pada umumnya dan khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik mengenai pengaruh

belanja pendidikan, belanja kesehatan dan belanja bantuan sosial terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten malaka

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada dikabupaten malaka yang dapat berguna bagi pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan dan pihak yang terkait dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.